

Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

PROSIDING *WORKSHOP*



Diterbitkan Atas Prakarsa
Bagian Pertanahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
Bekerjasama Dengan Program Kajian Agraria, LPPM -IPB



Daftar Isi

PRAKATA	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PENDAHULUAN	1
Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan.....	3
Sambutan Bupati Nunukan.....	9
Selayang Pandang “Gerbang Emas” Kabupaten Nunukan	12
KEYNOTE SPEECH.....	15
Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan (Endriatmo Soetarto).....	17
MAKALAH UTAMA.....	23
Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan: Pengalaman pada Kajian Penyelenggaraan Sembilan Kewenangan Pertanahan di Studi LMPDP 2006-2010 dan Lainnya (Baba Barus)	25
Pembaruan Agraria di Daerah Perbatasan (Purwanto)	39
Paradoks Perbatasan Negara (Dave Lumenta).....	43
Perbatasan Negara dan Reforma Agraria (Satyawan Sunito)	47
MAKALAH SUPLEMEN	57
Mensejahterakan Rakyat Lewat <i>Landreform</i> (Achmad Sodiki)	59
Kondisi Umum Kawasan Perbatasan dan Strategi Alternatif Pengembangan Wilayah Kalimantan Utara (Tri Widodo W. Utomo)	69
“Jaringan Perdagangan Bugis” dan Pola Penguasaan Sumberdaya Agraria di Kawasan Perbatasan Nunukan-Tawau (P. Setia Lenggono).....	85



Analisis Keberlanjutan Dimensi Ekologi Perkebunan Kakao Rakyat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik (<i>M. Hadiyanto</i>).....	111
Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Nunukan (Perbatasan Indonesia-Malaysia) (<i>Iin Solihin</i>).....	119
Potensi Sumberdaya Air di Sisi Timur Pulau Nunukan (<i>I. Hadi S. dan Wilda Naily</i>).....	133
Aplikasi GPS Dalam Penentuan Posisi Pulau di Tengah Laut Berdasarkan Metode Toponimi di Kabupaten Nunukan (<i>Yulius, I.R. Suhelmi dan M. Ramadhan</i>).....	147
Mengurai Eksistensi Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Perbatasan Negara (<i>Muhammad Karim dan Daud Yusuf</i>).....	157
Penetapan dan Penataan Batas Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (<i>Dina Sunyowati dan Eny Narwati</i>).....	177
Inspirasi Untuk Kebijakan <i>Land Reform</i> : Catatan Akhir (<i>Noer Fauzi Rahman</i>).....	201
LAMPIRAN	209



Mengurai Eksistensi Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Perbatasan Negara

Oleh:

Muhamad Karim¹ dan Daud Yusuf²

Abstrak

Pulau-pulau kecil Perbatasan (PPKB) merupakan aset bangsa yang mengandung nilai geopolitik dan geostrategis bagi kedaulatan bangsa atas sumberdaya kelautan dan pulau kecil di wilayah itu. Hingga kini perhatian serius terhadap pulau-pulau kecil masih relatif kurang. Apapun alasannya, PPKB dan seluruh komponen ekosistem di darat maupun perairannya merupakan sumberdaya agraria bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu melakukan suatu mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil sebagaimana merujuk pada ketentuan UUD 1945 kita dan peraturan perundangan turunannya yang juga tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sayangnya dalam perspektif agraria PPKB masih relatif kurang dalam hal kajian dan riset mengingat PPKB baru dalam satu dasawarsa terakhir mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan salah satu wujud perhatian itu yang sebelumnya telah justifikasi oleh UU No 43 Tahun 2008. Inilah pentingnya mengapa PPKB perlu dikelola secara serius karena berkaitan dengan eksistensi dan kedaulatan nasional di wilayah perbatasan.

Kata kunci: Geopolitik, Geostrategis, Pulau Kecil Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

1. Pendahuluan

Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (PPKB) yang berada di kawasan perbatasan Negara jumlahnya mencapai 92 buah pulau. Menurut pasal 8 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Negara Wilayah yakni secara yurisdiksi berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Pulau-pulau tersebut memiliki nilai strategis secara geo-politik, geo-ekonomi, geografi maupun geo-kultural.

Pertama, geo-ekonomi. Secara geo-ekonomi, PPKB memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang meliputi (i) sumberdaya kelautan berupa perikanan tangkap (ikan, teripang, kepiting, dan moluska), budidaya laut, terumbu karang, dan lamun, serta (ii) sumberdaya non-kelautan berupa hutan mangrove, tanaman perkebunan (kelapa), cengkeh, dan pala maupun tanaman pangan. Sumberdaya ekonomi tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang menghuninya.

¹ Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

² Dosen Universitas Negeri Gorontalo

